II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)

Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi. Komponen teknologi dasar PTT adalah teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi pilihan adalah teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam PTT adalah: (1) terpadu: PTT merupakan suatu pendekatan agar sumber daya tanaman, tanah dan air dapat dikelola dengan sebaik-baiknya secara terpadu, (2) sinergis: PTT memanfaatkan teknologi pertanian terbaik, dengan memperhatikan keterkaitan yang saling mendukung antar komponen teknologi, (3) spesifik lokasi: PTT memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial budaya dan ekonomi petani setempat, dan (4) partisipatif: berarti petani turut berperan serta dalam memilih dan menguji teknologi

yang sesuai dengan kondisi setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran dalam bentuk laboratorium lapangan.

Untuk tahapan penerapan PTT adalah: pemandu lapang bersama petani melakukan Pemahaman Masalah dan Peluang (PMP) atau Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP). Identifikasi masalah peningkatan hasil di wilayah setempat dan membahas peluang mengatasi masalah tersebut, berdasarkan cara pengelolaan tanaman, analisis iklim/curah hujan, kesuburan tanah, luas pemilikan lahan, lingkungan sosial ekonomi. Lalu, merakit berbagai komponen teknologi PTT berdasarkan kesepakatan kelompok untuk diterapkan di lahan usahataninya yang kemudian disusun dalam rencana usahatani kelompok yang merupakan hasil dari kesepakatan kelompok. Lalu, dimulailah penerapan PTT. Apabila pelaksaan telah berjalan baik maka dilakukan pengembangan PTT ke petani lainnya.

Komponen teknologi unggulan PTT padi terdiri dari komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan. Untuk komponen teknologi dasar terdiri dari: (1) Varietas unggul baru, inbrida (non hibrida), atau hibrida, (2) benih bermutu dan berlabel, (3) pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos, (4) pengaturan populasi tanaman secara optimum, (5) pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, (6) Pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) dengan pendekatan PHT (pengendalian hama terpadu). Sedangkan, komponen teknologi pilihan, yaitu: (1) pengelolaan tanah sesuai musim dan pola tanam, (2) penggunaan bibit muda (< 21

hari), (3) tanam bibit 1-3 batang per rumpun, (4) pengairan secara efektif dan efisien, (5) penyiangan dengan landak atau gasrok, (6) panen tepat waktu dan gabah segera dirontok.

Tidak semua tempat bisa dijadikan lokasi untuk program SL-PTT ini. Dalam penentuan calon Lokasi SL-PTT ada beberapa aspek yang harus dilaksanakan, seperti:

a) Lokasi dapat berupa persawahan yang beririgasi, sawah tadah hujan, lahan kering dan pasang surut yang produktivitas dan Indeks Pertanamannya masih dapat ditingkatkan. Priotas pertama lokasi SL-PTT tahun anggaran 2012 ditempatkan pada lokasi yang IP (Indeks Pertanaman) paling rendah dan atau pada lokasi yang produktivitasnya rendah (dibawah produktivitas kabupaten).
b) Diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, kebanjiran dan sengketa.
c) Unit SL-PTT, diusahakan agar berada dalam satu hamparan yang strategis dan mudah dijangkau petani.
d) Lokasi SL-PTT diberi papan nama sebagai tanda lokasi pelaksanaan SL/LL.
e) Letak Laboratorium Lapangan (LL) pada SL-PTT Reguler serta SL-PTT Spesifik Lokasi ditempatkan pada lokasi yang sering dilewati petani sehingga mudah dijangkau dan dilihat oleh petani sekitarnya.

Selain lokasi penentuan calon petani/kelompoktani SL-PTT memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti:

a) Kelompoktani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa dan atau Penyuluh.
b) Petani yang dipilih adalah petani aktif yang memiliki lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru.
c) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT.
d) Kelompoktani SL-PTT ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan/yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan pelaksana SL-PTT sebagai berikut :

1) Lokasi SL-PTT diusahakan berada pada satu hamparan, mempunyai potensi peningkatan produktivitas dan IP, serta anggota kelompoktaninya responsif terhadap penerapan teknologi.
2) Luas satu unit SL-PTT padi non hibrida adalah ± 25 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
3) Luas satu unit SL-PTT padi hibrida adalah ± 10 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha.
4) Luas satu unit SL-PTT padi gogo adalah ± 25 ha yang didalamnya terdapat satu unit LL seluas minimal 1 ha, namun jika keadaan tidak memungkinkan untuk SL-PTT padi gogo luasan satu unit SL 25 Ha dapat ditempatkan dalam beberapa lokasi masing-masing minimal 5 Ha, serta unit LL ditempatkan pada lokasi yang paling strategis.

5) Luas satu unit SL-PTT Spesifik Lokasi padi non hibrida Peningkatan Produktivitas dan IP adalah ± 25 ha yang keseluruhannya merupakan lokasi LL.
6) Luas satu unit SL-PTT Spesifik Lokasi padi hibrida peningkatan Produktivitas adalah ± 10 ha yang keseluruhannya merupakan lokasi LL.
7) Luas satu unit SL-PTT diatas (poin 2 s/d 7) dapat disesuaikan pada kondisi luasan setempat, dengan ketentuan :
   a. Luasan setiap unit SL-PTT bisa bervariasi disesuaikan dengan kondisi setempat namun total luasan dan unit SL-PTT tidak boleh kurang dari yang dibiayai.
   b. Total luasan dan unit SL-PTT bisa lebih dari yang dibiayai. Kelebihan luasan ataupun unit SL-PTT ditanggung anggaran lain ataupun swadana petani.
   c. Khusus untuk SL-PTT Reguler, Luas areal LL bisa lebih dari 1 ha apabila dananya masih memungkinkan tetapi tidak boleh kurang dari 1 ha.
8) Peserta tiap unit SL-PTT idealnya terdiri dari 15 – 25 petani yang berasal dari satu kelompoktani yang sama, namun jumlah peserta dapat dengan luas pemilikan lahan serta situasi dan kondisi setempat.
9) Memiliki Pemandu Lapangan.

Kelompok tani pelaksana SL-PTT dipilih berdasarkan syarat-syarat berikut ini:

1) Kelompoktani tersebut masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2) Telah menyusun RUK.
3) Kelompoktani penerima bantuan SL-PTT reguler dan SL-PTT spesifik lokasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
4) Memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah) yang terdekat dan bagi kelompoktani yang belum memiliki, harus membuka rekening di bank.
5) Rekening bank dapat berupa rekening bank setiap kelompoktani ataupun rekening bank gabungan kelompoktani (gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan mekanisme pengaturan antar kelompoktani dan jumlah kelompok yang digabung rekeningnya ditentukan dan disesuaikan dengan kondisi kabupaten setempat serta diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6) Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan SL-PTT sesuai peruntukannya dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya.
7) Bersedia menambah biaya pembelian saprodi bilamana bantuan tersebut tidak mencukupi.

8) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan SL-PTT. (Kementerian Pertanian, 2011)

2. Kebijakan Harga Output

Kebijakan harga merupakan salah satu kebijakan yang terpenting di banyak negara dan biasanya digabung dengan kebijakan pendapatan, sehingga disebut dengan kebijakan harga dan pendapatan (*price and income policy*). Dari segi harga, kebijakan ini bertujuan untuk mengadakan stabilisasi harga, sedangkan dari segi pendapatan bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijakan harga dapat mengandung pemberian suatu penyangga atas harga-harga hasil pertanian supaya tidak terlalu merugikan petani atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi petani (Mubyarto, 1989).

Mubyarto (1989) menyatakan bahwa secara teoritis, kebijakan harga dapat dipakai untuk mencapai tiga tujuan, yaitu : (1) stabilisasi harga hasil -- hasil pertanian terutama pada tingkat petani, (2) meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan dasar tukar (*term of trade*), dan (3) memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi. Kebijakan harga di Indonesia ditekankan pada tujuan yang pertama.

Pemerintah menetapkan suatu harga minimum bagi barang atau jasa tertentu yang disebut harga dasar (*floor price*). Harga dasar yang ditetapkan sama atau kurang dari harga *ekuilibrium* (harga yang terjadi

dimana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan) tidak akan berpengaruh, karena titik *ekuilibrium* tetap bisa dicapai dan akan tetap konsisten dengan harga dasar yang resmi. Akan tetapi jika harga dasar ditetapkan lebih tinggi dari harga *ekuilibrium*, harga dasar ini akan mengikat atau efektif.

Penetapan harga dasar tersebut pada awalnya mengikuti rumus tani yaitu dengan perbandingan harga 1 kg padi dengan 1 kg pupuk urea, kemudian tahun 1972-1973 penetapan harga diubah dengan IBCR (*Incremental Benefit Cost Ratio*) sehingga dapat memberi peluang ikutnya teknologi lain selain pupuk untuk dihitung dalam penetapan harga dasar.

Berdasarkan Inpres RI No.13 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah maka harga pembelian pemerintah untuk gabah/beras dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 25% (dua puluh lima perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 10% (sepuluh perseratus) adalah Rp 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per kilogram di penggilingan
2. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga perseratus) adalah Rp. 4.150(empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram di

penggilingan, atau Rp 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG

3. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus) adalah Rp 6.600 (enam ribu enam ratus rupiah) per kilogram di gudang Perum BULOG.

3. Kebijakan Subsidi

Subsidi adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningktan rill apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi pemerintah dengan harga jual yang rendah (Suparmoko, 2003 dalam Zulkarnain, 2010). Pupuk merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya usahatani, pemerintah mulai memberikan subsidi harga pupuk sejak tahun 1971. Pemberian subsidi pupuk dilakukan dalam rangka mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional melalui peningkatan produksi komoditas pertanian dan mengingat peranan pupuk yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Subsidi harga pupuk dimaksudkan untuk mengurangi biaya produksi dan merangsang penggunaan pupuk sehingga meningkatkan produksi dan pendapatan petani (Adjid, 1992 dalam Cahyono, 2001).

Input pupuk merupakan komponen pengeluaran biaya usahatani yang terbesar setelah tenaga kerja dan benih. Penghapusan subsidi pupuk mempunyai konsekuensi terhadap perubahan harga pupuk di tingkat petani. Perubahan harga pupuk akan mempengaruhi struktur biaya usahatani tanaman pertanian dalam hal ini padi. Dengan mengasumsikan faktor lain tetap, kenaikan harga pupuk akan menyebabkan permintaan pupuk petani menurun. Namum demikian, hal ini masih tergantung dari faktor lainnya yaitu apakah kenaikan harga pupuk ini diikuti oleh kenaikan harga tanaman padi. Penghapusan subsidi pupuk akan mengakibatkan harga pupuk di tingkat petani meningkat dan berpengaruh terhadap produksi padi.

Sejak Repelita I pemerintah telah memberikan subsidi pupuk. Dengan adanya subsidi tersebut harga pupuk menjadi lebih rendah dari harga ekonominya. Krisis ekonomi yang berkepanjangan berakibat menurunnya penerimaan negara sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Guna mengurangi beban anggaran, pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Desember 1998 yang antara lain meliputi : (1) menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pertanian maupun perkebunan; (2) menghapus secara bertahap subsidi pupuk minimal dalam 3 tahun; (3) menghilangkan monopoli distribusi dan membuka peluang produsen pupuk untuk berkompetisi secara sehat; (4) menghapus *holding company* dan membiarkan antar produsen pupuk

berkompetisi secara sehat; dan (5) menghapus kuota ekspor dan kontrol pada impor pupuk (Sudaryanto, 2001 dalam Zulkarnain, 2010).

Terdapat beberapa alasan dari penghapusan subsidi pupuk antara lain: (1) penghapusan subsidi pupuk secara total telah berdampak positif terhadap struktur aplikasi penggunaan berbagai jenis pupuk (penggunaan berimbang) dimana penggunaan urea dan TSP menurun, sebaliknya penggunaan jenis pupuk lain meningkat; (2) alokasi penggunaan pupuk yang cenderung berimbang berdampak positif terhadap produkivitas padi (Nurmanaf dan Darwis, 2004). Secara makro kebijakan penghapusan subsidi pupuk merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pembangunan, akan tetapi kenaikan harga pupuk sebagai akibat penghapusan subsidi tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan pada petani agar dapat menggunakan pupuk secara lebih efisien. Penggunaan pupuk yang semakin efisien merupakan inovasi baru yang menjanjikan keuntungan, karena mendorong petani untuk berupaya membiayai input usahataninya sendiri (Darmawan et al, 1995 dalam Nurmanaf dan Darwis, 2004).

4. Teori daya saing

Suatu negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan negara lain apabila negara tersebut berspesialisasi dalam komoditas yang dapat diproduksi dengan lebih efisien (mempunyai keunggulan absolut). Smith dengan teorinya mengenai keunggulan absolut menyatakan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut

dalam memproduksi kedua komoditas jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam memproduksi komoditas ekspor yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil. Dipihak lain negara terebut sebaliknya akan mengimpor komoditas yang mempunyai kerugian absolut lebih besar (Salvatore, 1997 dalam Pakpahan, 2005).

Konsep daya saing berpijak dari konsep keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh Ricardo pada tahun 1823, yang selanjutnya dikenal dengan Model Ricardo atau Hukum Keunggulan Komparatif (*The Law of Comparative Advantage*). Ricardo menyatakan bahwa meskipun suatu negara kurang efisien dibandingkan negara lain dalam memproduksi kedua komoditas, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (memiliki keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditas yang memiliki kerugian absolut lebih besar atau memiliki kerugian komparatif (Salvatore, 1997 dalam Pakpahan, 2005).

Teori keunggulan komparatif Ricardo kemudian disempurnakan oleh Haberler (1936) yang mengemukakan konsep keunggulan komparatif yang berdasarkan Teori Biaya Imbangan (*Opportunity Cost Theory*). Haberler menyatakan bahwa biaya dari satu komoditas adalah jumlah komoditas

kedua terbaik yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memperoleh satu unit tambahan komoditas pertama.

Menurut Simatupang (1991) dalam Zulkarnain (2010), konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam arti daya saing akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali, komoditas yang memiliki keunggulan komparatif (efisiensi secara ekonomi). Keunggulan komparatif menggambarkan efisiensi penggunaan sumberdaya untuk memproduksi suatu produk tertentu yang diukur pada kondisi perdagangan internasional. Asumsi perekonomian yang tidak mengalami hambatan atau distorsi sama sekali sulit ditemukan pada dunia nyata, khususnya di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, keunggulan komparatif tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keuntungan suatu aktivitas ekonomi dari sudut pandang badan atau orang-orang yang berkepentingan langsung dalam suatu proyek. Konsep yang lebih cocok untuk mngukur kelayakan secara finansial adalah keuntungan kompetitif.

Keunggulan kompetitif adalah alat untuk mengukur kelayakan suatu aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga pasar dan nilai tukar resmi yang berlaku (secara finansial), sehingga konsep keunggulan kompetitif bukan merupakan suatu konsep yang sifatnya menggantikan atau mensubtitusi konsep keunggulan komparatif, akan tetapi merupakan konsep yang sifatnya saling melengkapi. Dalam hal ini, keunggulan kompetitif digunakan untuk mengukur daya saing kegiatan

ekonomi (produksi) pada kondisi ekonomi aktual atau pada suatu perusahaan individu.

Konsep keunggulan kompetitif pertama kali dikembangkan oleh Porter pada tahun 1980 bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan perdagangan internasional yang ada. Porter menyatakan bahwa keunggulan perdagangan antara negara dengan negara lain di dalam perdagangan internasional secara fisik untuk produk-produk tertentu sebenarnya tidak ada. Keunggulan kompetitif dapat dicapai dan dipertahankan dalam suatu sub sektor tertentu di suatu negara, dengan meningkatkan produktivitas penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada (Warr, 1994 dalam Suryana, 1995). Menurut Asia Development Bank (1993) dalam Suryana (1995), menyatakan bahwa di bawah asumsi adanya sistem pemasaran dan intervensi pemerintah, maka suatu negara akan dapat bersaing di pasar internasional jika negara tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dalam menghasilkan suatu komoditas. Dengan demikian, keunggulan kompetitif mulai digunakan sebagai alat ukur kelayakan suatu aktivitas berdasarkan keuntungan privat yang dihitung atas harga pasar dan nilai uang resmi yang berlaku.

Pengembangan produksi suatu komoditas tertentu, menggunakan dua konsep yaitu konsep keunggulan komparatif yang digunakan untuk mengkaji secara ekonomi berdasarkan harga bayangan (*shadow price*) yang menunjukkan nilai faktor-faktor input dan output pada kondisi pasar persaingan sempurna, sedangkan konsep keunggulan kompetitif untuk

menganalisis secara finansial berdasarkan harga pasar dari faktor input dan output pada kondisi pasar terdistorsi.

Suatu komoditas dapat mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sekaligus, berarti komoditas tersebut menguntungkan untuk diproduksi atau diusahakan dan dapat bersaing di pasar internasional. Apabila komoditas yang diproduksi di suatu negara hanya mempunyai keunggulan komparatif namun tidak memiliki keunggulan kompetitif, maka di negara tersebut dapat diasumsikan terjadi distorsi pasar atau terdapat hambatan-hambatan yang mengganggu kegiatan produksi sehingga merugikan produsen seperti prosedur administrasi, perpajakan, dan lain-lain. Untuk itu pemerintah perlu melakukan deregulasi yang dapat menghilangkan hambatan (distorsi pasar tersebut). Bila suatu komoditas hanya memiliki keunggulan kompetitif dan tidak memilki keunggulan komparatif, maka kondisi ini akan terjadi apabila pemerintah memberikan proteksi terhadap komoditas tersebut, seperti melalui jaminan harga, kemudahan perizinan, dan kemudahan fasilitas lainnya (Sudaryanto, et al 1993).

5. Konsep *Policy Analisys Matrix* (PAM)

Policy Analysis Matrix (PAM) digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh dan konsisten terhadap kebijakan mengenai penerimaan, biaya usahatani, tingkat perbedaan pasar, sistem pertanian, investasi pertanian, dan efisiensi ekonomi. Metode PAM mempunyai 3 tujuan utama, yaitu pertama, memberikan informasi dan analisis untuk membantu pengambilan kebijakan pertanian dalam tiga isu sentral, dimana tiga isu

sentral sebagai berikut; Pertama, apakah sebuah sistem usahatani memiliki daya saing pada tingkat harga dan teknologi yang ada (apakah petani, pedagang, dan pengolah mendapatkan keuntungan pada tingkat harga aktual. Kedua, dampak investasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur baru terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani. Ketiga, dampak investasi baru dalam bentuk riset atau teknologi pertanian terhadap tingkat efisiensi sistem usahatani. Tujuan kedua dari analisis PAM ialah menghitung tingkat keuntungan sosial sebuah usahatani yang dihasilkan dengan menilai output dan biaya pada tingkat harga efisien (*social opportunity costs*). Dan tujuan yang ketiga ialah menghitung *transfer effects*, sebagai dampak dari sebuah kebijakan.

Matrik PAM terdiri dari dua identitas yaitu identitas tingkat keuntungan (*profittability*) dan identitas penyimpangan (*divergences identity*). Identitas keuntungan ada dua yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Keuntungan privat merupakan selisih antara penerimaan dan biaya yang dihitung berdasarkan harga privat. Perhitungan keuntungan privat dari data usahatani dan pengolahan hasil dilakukan untuk mengukur daya saing. Keuntungan sosial sama dengan keuntungan privat, perbedaannya hanya terletak pada dasar penggunaan harga yaitu harga sosial atau ekonomi. Identitas penyimpangan timbul karena adanya distorsi kebijakan atau kegagalan pasar (*market failure*), pasar dikatakan gagal apabila tidak mampu menciptakan harga yang kompetitif yang dapat mencerminkan *social opportunity cost* yang menciptakan alokasi sumberdaya maupun produk yang efisien.

Beberapa analisis yang dapat dijelaskan berdasarkan Matrik PAM yang disarikan dari Monke dan Pearson (1995) adalah :

(1) Kebijakan terhadap input

Kebijakan pada *input tradable* dapat berupa pajak, subsidi, dan hambatan perdagangan. Dampak kebijakan tersebut dapat dijelaskan melalui IT (*Input Transfer*), NPCI (*Nominal Protection On Input*) dan TF (*Transfer Faktor*).

Input Transfer (IT) merupakan selisih antara biaya *input tradable* privat dengan biaya *input tradable* sosial. Nilai IT menunjukkan kebijakan pemerintah yang diterapkan pada *input tradable* privat dan sosial. Nilai IT negatif menunjukkan kebijakan pemerintah memberikan subsidi pada *input tradable*, subsidi yang diberikan pemerintah menyebabkan keuntungan yang diterima secara privat lebih kecil dibandingkan jika tanpa adanya kebijkan, hal sebaliknya akan terjadi jika IT bernilai positif.

Koefisien proteksi input nominal (NPCI) adalah rasio biaya *input tradable* berdasarkan harga privat dan biaya *input tradable* berdasarkan harga sosial. Perbedaan antara kedua biaya tersebut menunjukkan adanya proteksi pemerintah yang mengakibatkan harga privat *input tradable* berbeda dengan harga sosial *input tradable.* Nilai NPCI < 1, berarti ada kebijakan subsidi terhadap *input tradable,* jika NPCI > 1, berarti tidak ada kebijakan subsidi terhadap input *tradable*.

Kebijakan terhadap *input non tradable* dapat dilihat dari Transfer Faktor (FT) adalah nilai perbedaan harga *input non tradable* privat dengan harga *input non tradable* sosial yang diterima oleh produsen. Campur tangan pemerintah terhadap *input non tradable* dilakukan dalam bentuk kebijakan subsidi atau pajak, karena input *non tradable* hanya diproduksi dan dikonsumsi didalam negeri, sehingga intervensi pemerintah berupa hambatan perdagangan tidak tampak. Nilai FT > 0, mengandung arti bahwa ada transfer dari petani produsen kepada produsen *input non tradeable*, hal sebaliknya akan terjadi jika FT < 0.

(2) Kebijakan terhadap output

Kebijakan terhadap output akan menyebabkan harga bayangan barang, jumlah barang, surplus konsumen dan surplus produsen berubah, hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan *Transfer Output* (OT) dan *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO). Transfer Output merupakan selisih antara penerimaan privat (finansial) dengan penerimaan sosial (ekonomi).

Transfer Output (OT) menunjukkan kebijakan yang diterapkan pada output mengakibatkan harga output privat dan harga output sosial berbeda. Nilai OT positif menunjukkan besarnya insentif masyarakat atau konsumen harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya diterima, sebaliknya jika OT bernilai negatif maka besarnya insentif masyarakat atau konsumen harus membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya diterima.

Koefisien proteksi output nominal (NPCO) adalah harga privat dibagi dengan harga sosial yang dapat dibandingkan. NPCO dapat digunakan untuk mengukur dampak insentif kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai output yang diukur dengan harga privat dan harga sosial. Nilai NPCO < 1 menunjukkan bahwa akibat kebijakan pemerintah, harga privat lebih kecil dari harga sosial sehingga dapat dikatakan bahwa produsen output memberikan transfer kepada pemerintah.

(3) Kebijakan tehadap input-output

Dampak kebijakan secara keseluruhan terhadap input-output dilihat dari nilai Koefisien Proteksi Efektif (EFC), Transfer Bersih (NT), Koefisien Keuntungan (PC), dan Rasio Subsidi Produsen (SRP). Analisis EFC tidak memperhitungkan dampak kebijakan yang mempengaruhi harga *input non tradable*, sedangkan NT, PC, dan SRP memperhitungkan dampak kebijakan terhadap harga *input tradable* dan *non tradable*.

Koefisien Proteksi (EPC) adalah analisis gabungan koefisien proteksi output (NPCO) dengan koefisien proteksi input nominal (NPCI). Nilai EPC menggambarkan arah kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* apakah bersifat melindungi atau menghambat produksi secara efektif. Nilai EFC merupakan rasio perbedaan antara penerimaan dan biaya input *tradable* dalam harga privat dengan harga sosial. Rasio ini merupakan indikator pengaruh insentif atau disinsentif dari kebijakan secara keseluruhan terhadap harga input atau output *tradable*. Nilai EPC > 1

menunjukkan bahwa keuntungan privat lebih besar daripada tanpa kebijakan, yang berarti kebijakan yang ada memberikan insentif untuk berproduksi. Sedangkan EFC < 1 berarti kebijakan pemerintah menghambat produksi.

Nilai Transfer Bersih (NT) dapat digunakan untuk melihat ketidakefisienan dalam sistem pertanian. NT adalah selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosial. Nilai NT juga menggambarkan selisih antara transfer output dengan transfer input dan transfer faktor. Jika nilai NT > 0 maka nilai tersebut menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dilakukan pada input dan output. Jika nilai NT < 0 maka yang terjadi adalah sebaliknya.

Koefisien Keuntungan (PC) adalah perbandingan antara keuntungan bersih privat dengan keuntungan bersih sosial. Nilai PC <1 menunjukkan kebijakan pemerintah membuat keuntungan yang diterima produsen lebih kecil bila dibandingkan tanpa ada kebijakan, artinya produsen harus mengeluarkan sejumlah dana kepada masyarakat atau konsumen. Jika nilai PC < 1 maka yang terjadi adalah sebaliknya.

Rasio Subsidi Produsen (SRP) menunjukkan persentase subsidi atau insentif bersih atas peneriman yang dihitung dengan biaya bayangan. Nilai SRP negatif menunjukkan kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini membuat produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar

dari biaya imbangan untuk berproduksi. Jika nilai SRP positif maka yang terjadi adalah sebaliknya.

Menurut Monke dan Pearson (1995) ada tiga bahasan pokok yang dapat dijelaskan melalui pendekatan PAM, yaitu;

1) PAM dapat digunakan untuk mengukur dampak kebijakan terhadap tingkat persaingan pada berbagai tingkat keuntungan (finansial dan ekonomi), pengaruh efisiensi ekonomi dan keunggulan komperatif terhadap kebijakan investasi dan efek dari perubahan teknologi terhadap pengembangan pertanian.
2) Efisiensi ekonomi atau keunggulan komparatif dalam investasi pertanian berdasarkan kesesuaian atau keunggulan teknologi dan kondisi alam (agroklimat). Berdasarkan keunggulan tersebut kebijakan penggunaan sumberdaya alam layak atau tidak dikembangkan melalui investasi dalam negeri atau luar negeri. Daya tarik investasi akan berdampak kepada peningkatan efisiensi dan percepatan pertumbuhan pendapatan nasional.
3) PAM erat kaitannya dengan rangkaian persoalan atau masalah, dalam pengalokasian dana penelitian atau riset dibidang pertanian. Dengan PAM seorang peneliti dapat menentukan kebijakan utama terhadap peningkatan produksi pertanian dan mengurangi biaya sosial atau peningkatan keuntungan.

Tahapan yang digunakan dalam perhitungan analisis PAM yang disarikan dari Monke dan Person (1995) adalah sebagai berikut :

1) Mengidentifikasikan input yang digunakan dan output yang dihasilkan dalam kegiatan yang akan dianalisis (*evaluation of input and output*).
2) Memisahkan seluruh biaya kegiatan tersebut ke dalam komponen domestik dan asing atau *tradable* dan *non tradable* (*disaggregating input cost into domestic faktor and tradable input component*).
3) Menetukan harga pasar dan menakir harga bayangan input dan output (*estimating private and social prices*).

Perhitungan model PAM dilakukan melalui analisis matriks, dimana baris pertama adalah perhitungan berdasarkan harga privat atau harga setelah kebijakan. Baris ke dua adalah perhitungan berdasarkan harga sosial dan baris ke tiga merupakan selisih antara harga privat atau harga sosial yang menunjukkan adanya kebijakan terhadap input dan output, yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. *Policy Analysis Matrix* (PAM)

	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
	Output	Input Tradable	Input Non Tradable	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Divergensi	I	J	K	L

Sumber : Monke dan Pearson, 1995

Keterangan :

Pendapatan Privat	(D)	= A-(B+C)
Pendapatan Sosial	(H)	= E-(F+G)
Transfer Output (OT)	(I)	= A-E
Transfer Input Tradable/Input (IT)	(J)	= B-F
Transfer Input non Tradable (FT)	K)	= C-G
Transfer Bersih (NT)	(L)	= D-H
Rasio Biaya Privat (PCR)		= C/(A-B)

Rasio BSD (DRCR)	= G/(E-F)
Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO)	= A/E
Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI)	= B/F
Koefisien Proteksi Efektif (EPC)	= (A-B)/(E-F)
Koefisien Keuntungan (PC)	= D/H
Rasio Subsidi Bagi Produsen	= L/E

6. Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Komparatif

Konsep keunggulan kompetitif (*Relieved Competitive advantage*) digunakan untuk mengukur kebijakan suatu aktivitas atau keuntungan privat yang dihitung berdasarkan harga pasar dan nilai uang yang berlaku atau berdasarkan analisis finansial. Suatu negara akan menghasilkan komoditi yang memilki keunggulan kompetitif apabila biaya produksi komparatif, bermutu, berdesain, dan berkemampuan.

Keunggulan kompetitif timbul didasarkan pada kenyataan bahwa perekonomian yang tidak mengalami distorsi sulit sekali ditemui di dunia nyata, yang menyebabkan keunggulan komparatif tidak dapat digunakan untuk mengukur daya saing suatu kegiatan ekonomi pada kondisi perekonomian aktual. Keunggulan kompetitif bukan merupakan konsep yang sifatnya menggantikan konsep keunggulan komparatif, tetapi merupakan konsep yang bersifatnya melengkapi (Warr, 1994 dalam Hartati, 2001).

Dalam matrik PAM keunggulan kompetitif diterangkan melalui PCR atau *Private Cost Ratio* yaitu merupakan rasio antara biaya input domestik dengan nilai tambah output atau selisih antara penerimaan finansial dan input asing finansial.

Keunggulan komparatif adalah kondisi pasar persaingan sempurna baik untuk pasar input maupun pasar output. Keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing potensial yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Keunggulan komperatif dapat digunakan membandingkan beragam kegiatan ekonomi (produksi) di dalam negara terhadap perdaganagan dunia (Gray et al, 1986).

Keunggulan komparatif suatu komoditi diukur berdasarkan harga sosial atau berdasarkan analisis ekonomi yang akan menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya dari unsur biaya maupun hasil. Dengan demikian suatu komoditi yang memiliki keunggulan komparatif menunjukkan bahwa kegiatan dalam menghasilkan komoditi tersebut efisien secara ekonomi.

Konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Konsep keunggulan komparatif dianggap menpunyai dua aplikasi yang berbeda yaitu; (1) sebagai dasar untuk menjelaskan pola spesialisasi internasional dalam produksi dan perdagangan, (2) sebagai petunjuk pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan dengan sumber-sumber dan perdagangan. Dalam matrik PAM keunggulan komparatif diterangkan melalui *Domestic Resources Cost Ratio (DRCR)* yaitu merupakan rasio antara biaya input domestik dengan nilai tambah

output atau selisih antara penerimaan ekonomi dengan input asing ekonomi.

7. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Budi Iriana (2005), meneliti tentang Analisis Dampak Kebijakan Tarif Impor Beras Terhadap Daya Saing dan Profitabilitas Usahatani Padi Sawah di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan periode 2002-2003. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk Menganalisis dampak kebijakan tarif impor beras terhadap dayasaing dan profitabilitas usahatani padi yang difokuskan pada komoditas padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan Periode 2002-2003. Hasil yang didapat adalah Kebijakan tarif impor beras yang telah diimplementasikan sejak tahun 2000 hingga saat ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing dan profitabilitas usahatani padi sawah di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada periode 2002-2003.

Desliana (2005), melakukan penelitian tentang analisis daya saing dan efesiensi usahatani padi organik di Propinsi Lampung. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dampak kebijakan padi organik terhadap usahatani padi organik dan mengetahui daya saing dan efisiensi usahatani padi organik di Propinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak kebijakan yang diterapkan pada usahatani padi organik menyebabkan timbulnya pajak, tingginya biaya input, dan tidak memberikan insentif ekonomi bagi produsen. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa daya saing dan efisiensi tidak peka

terhadap perubahan harga output, biaya pupuk kandang, biaya tenaga kerja, dan biaya sewa lahan.

Makarim dkk (2006), meneliti tentang peningkatan produktivitas padi pada lahan sawah tadah hujan melalui pengelolaan tanaman terpadu. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mendapatkan model usahatani berbasis padi yang optimal (hasil tinggi, menguntungkan, dan input sesuai kemampuan petani) pada lahan sawah tadah hujan di wilayah sumber daya rendah. Hasil dari penelitian tersebut adalah pada lahan sawah tadah hujan dengan pola tanam padi gogorancah - padi walik jerami, perbaikan cara budi daya dengan (1) penggunaan varietas introduksi Situ Patenggang untuk sistem gogorancah dan Fatmawati untuk sistem walik jerami, (2) jarak tanam legowo 2:1, (3) pupuk organik 2 t/ha, dan (4) pemberian pupuk N berdasarkan BWD dengan takaran 120 kg N/ha (267 kg urea/ha), 36 kg P2O5/ha (100 kg SP36/ha) dan 60 kg K2O/ha (100 kg KCl/ha).

Malia, dkk (2008), meneliti tentang kelayakan usahatani padi sawah melalui penerapan PTT dengan penekanan pada optimalisasi bahan organik di Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk Mengetahui kelayakan teknis dan finansial usahatani padi berbasis bahan organik yang tersedia di lokasi usahatani. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa usahatani dengan menggunakan PTT di Desa Cempaka memiliki kelayakan baik secara teknis maupun secara finansial dengan nilai B/C= 1,11 dan R/C=2,11.

Rohman (2008), meneliti tentang analisis daya saing beras pandan wangi dan varietas unggul baru (*Oryza sativa*) (Kasus Desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi Pandan Wangi dan Varietas Unggul Baru di Desa Bunikasih, Kecamatan Warung kondang, Kabupaten Cianjur dan juga menganalisis daya saing usahatani padi pandan wangi dan varietas unggul baru akibat adanya perubahan variabel penerimaan dan variabel biaya di Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur. Hasil yang didapat adalah 1. Pengusahaan beras Pandan Wangi dan beras Varietas Unggul Baru di desa Bunikasih Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Pengusahaan kedua komoditi tersebut memberikan keuntungan baik secara finansial dan ekonomi. Hasil analisis sensitivitas berdasarkan perubahan 16 persen pada masing-masing variabel, menunjukan bahwa pengusahaan kedua komoditi beras yang dianalisis lebih peka terhadap perubahan harga jual output, terutama jika terjadi penurunan harga.

Krismawati, dkk (2010), meneliti tentang kajian penerapan pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah di Kabupaten Madiun. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui keragaan hasil panen dan keuntungan penerapan PTT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PTT menggunakan Inpari 4 berproduksi lebih tinggi daripada di non SL-PTT.

Marsudi, (2010), meneliti tentang evaluasi petani peserta program sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu (SLPTT) padi di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perbedaan efisiensi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terhadap produksi dan pendapatan usahatani padi sebelum dan sesudah pelaksanaan Program SL-PTT padi di Kabupaten Ngawi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat efisiensi usahatani sebelum dan sesudah penerapan program SL-PTT padi terlihat dari perbandingan R/C sebelum SL-PTT adalah sebesar 1,56, sedangkan setelah SL-PTT adalah sebesar 1,88. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi berbeda antara sebelum dan sesudah penerapan program SL-PTT padi. Penggunaan benih unggul, pestisida dan keikutsertaan petani dalam program SL-PTT berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi padi. Penggunaan pupuk, tenaga kerja (pengendalian gulma) dan biaya lain-lain (sewa lahan, biaya pengairan, pajak dan iuran) penggunaannya (khususnya pengairan) sudah tidak efisien lagi sehingga berpengaruh negatif.

Zulkarnain, (2010), meneliti tentang keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi padi sehingga usahatani padi layak untuk terus dikembangkan, analisis sensitivitas terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif pada usahatani padi menunjukkan bahwa adanya kepekaan terhadap perubahan

harga output dan tidak ada kepekaan terhadap perubahan harga input. Hal ini dapat dilihat dari nilai elastisitas PCR dan DRCR untuk harga output yang bernilai lebih dari satu dan harga input kurang dari satu.

Dewi, (2011) meneliti tentang dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap keunggulan kompetitif dan tingkat keuntungan usahatani padi di Kabupaten Tabanan (pendekatan metode *policy analysis matrix*-PAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan kompetitif usahatani padi sawah sebagai dampak dari subsidi pupuk di Kabupaten Tabanan dan menganalisis tingkat keuntungan usahatani padi sawah sebagai dampak dari akibat adanya subsisi pupuk di Kabupaten Tabanan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usahatani padi sawah di Kabupaten Tabanan memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif pada musim kemarau dan musim hujan. Tingkat keuntungan finansial usahatani padi sawah pada musim kemarau di Kabupaten Tabanan sebesar Rp 5.625.704,23/ha dengan nilai PBCR = 1,40, sedangkan keuntungan finansial usahatani padi sawah pada musim hujan sebesar Rp 5.802.663,42/ha dengan nilai PBCR = 1,39, atau terjadi perbedaan keuntungan relatif tipis yakni sebesar 3,15 %. Sedangkan keuntungan ekonomi usahatani padi sawah pada musim kemarau sebesar Rp 3.052.706,47/ha dan musim hujan sebesar Rp 1.234.146,40/ha, dengan nilai SBCR masing-masing 1,28 dan 1,08.

Yanuarto, (2011) meneliti tentang dampak program sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (slptt) terhadap pendapatan petani padi di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

Mengetahui tingkat adopsi teknologi SLPTT dan dampak SLPTT terhadap pendapatan petani padi di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa komponen teknologi seperti bibit muda, sistem tanam, pemupukan N berdasarkan tingkat kehijauan warna daun, pemupukan organik, pengairan berselang dan pengendalian gulma masuk dalam kategori adopsi sedang artinya adopsi teknologi belum maksimal. Kedepan penyuluh Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) harus mencari metode pendekatan penyuluhan yang lebih baik lagi agar semua komponen teknologi terserap secara maksimal.

Rahmawati (2011), melakukan penelitian tentang evaluasi program sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu (SL-PTT) padi di Kabupaten Bantaeng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses dan mekanisme implementasi program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi, khususnya di wilayah kelompoktani Lamalaka II, Lembang, Bantaeng dan untuk mengkaji bagaimana efektifitas program SL-PTT padi mempengaruhi upaya percepatan adopsi inovasi PTT di tingkat petani. Hasil yang didapat adalah Proses dan implementasi pelaksanaan Program SL-PTT Padi pada tahap Pemenuhan Persyaratan Kelompoktani, tahap Komponen Teknologi Unggulan PTT Padi, tahap jumlah bantuan benih padi, dan pada tahap pelaksanaan pertemuan dan pelatihan sekolah lapang ptt berjalan dengan baik, sedangkan pada tahap Pemilihan dan Penentuan CPCL, tahap Pelatihan Petugas SL-PTT, dan pada tahap Mekanisme Pelaksanaan

Sekolah Lapang PTT, pelaksanaannya kurang baik. Perubahan sikap terhadap tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap responden setelah intens mengikuti Sekolah Lapang PTT padi sebanyak 8 kali pertemuan, dikatakan efektif dalam upaya percepatan adopsi inovasi PTT padi.

Laksmi, dkk (2012), menganalisis tentang efisiensi usahatani padi sawah (studi kasus di Subak Guama, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan). Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis efisiensi usahatani padi sawah di Subak Guama Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis efisiensi penggunaan input usahatani padi sawah di Subak Guama, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan pada satu musim tanam dari bulan Maret-Juni 2011 menunjukkan bahwa input pupuk Urea, pupuk NPK (Phosnka dan Pelangi), pupuk organik dan tenaga kerja sudah efisien, sedangkan secara ekonomis penggunaan pestisida tidak efisien, maka perlu mengurangi jumlah penggunaan secara tepat jenis, dosis, waktu dan cara pemberian sehingga menghasilkan produksi padi yang optimal dan petani memperoleh keuntungan yang maksimum.

Sugiarti (2012) menganalisis tentang keunggulan komparatif dan kompetitif produksi padi dengan metode sistem intensifikasi padi di Propinsi Lampung. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengetahui apakah Propinsi Lampung memeiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi padi dengan metode system of rice Intensification (SRI) dan mengetahui bagaimana kepekaan perubahan

harga output dan harga input terhadap keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI). Hasil dari penelitian tersebut adalah usahatani padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI) di Propinsi Lampung memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani padi dengan metode *system of rice intensification* (SRI) di Propinsi Lampung peka terhadap perubahan harga output pada harga privat dan pada harga sosial. Kenaikan atau penurunan dari harga output akan mempengaruhi keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani padi dengan metode SRI di Propinsi Lampung.

Hutapea (2012), menganalisis tentang efisiensi usahatani dengan pelaksanaan sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu padi (Kasus di Desa Pagarsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk Membandingkan efisiensi usahatani padi akibat penerapan inovasi, biaya yang dikeluarkan, produksi dan pendapatan usahatani padi yang diperoleh sebelum dan sesudah pelaksanaan SL-PTT Padi dan antara petani peserta dan bukan peserta SL-PTT Padi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada musim tanam yang sama petani peserta lebih efisien dibandingkan dengan yang bukan peserta. Biaya pokok pokok untuk menghasilkan gabah kering panen pada petani peserta Rp 1.229.56/kg sedangkan bukan peserta sebesar Rp 1.364,18. Nilai R/C usahatani padi petani peserta 2,44 sedangkan bukan peserta sebesar 2,20 dengan nilai MBCR sebesar 3,97

B. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka pembangunan pertanian, maka sumberdaya yang terbatas ketersediaannya harus dialokasikan seoptimal mungkin untuk kegiatan pertanian yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi. Dalam lingkungan ekonomi dunia maupun domestik dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pasar input dan output usahatani padi. Apabila ketersediaan input pasar terbatas atau tidak ada sama sekali, maka input dapat diperoleh dari impor atau perdagangan antar daerah, walaupun harga yang terbentuk lebih mahal.

Suatu negara akan sulit untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa bekerja sama dengan negara lain karena tidak semua sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dapat diperoleh dari dalam negeri. Negara-negara yang akan melakukan perdagangan (*trading*) mempunyai tujuan untuk mencapai skala ekonomi (*economic of scale*) dalam produksi komoditas yang dihasilkannya. Hal ini berarti bahwa suatu negara akan cenderung memproduksi suatu komoditas dengan skala yang lebih besar dan efisien.

Proses produksi dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas yang diandalkan tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya domestik. Prinsip-prinsip efisiensi dalam penggunaan lahan, tenaga kerja, modal serta manajemen haruslah digunakan seoptimal mungkin agar didapatkan produksi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga diharapkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar internasional. Suatu

komoditas yang mampu bersaing di pasar internasional akan mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi negara yaitu berupa devisa serta peningkatan kesejahteraan petani namun kesemuanya juga tergantung dari pihak pemerintah berupa kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi. Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) adalah suatu tempat pendidikan non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, mengatasi permasalahan, mengambil keputusan dan menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahataninya menjadi efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Agar sasaran peningkatan produksi dapat tercapai maka penentuan areal SL-PTT diharapkan mengacu kepada daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah (di bawah produktivitas kabupaten) serta pada daerah yang masih berpeluang untuk ditingkatkan indeks pertanamannya (IP) dengan tetap melaksanakan prinsip-prinsip laboratorium lapangan. Berdasarkan persyaratan tersebut diatas, maka pelaksanaan SL-PTT dapat dibedakan menjadi:

a) SL-PTT Reguler adalah areal SL-PTT yang sudah berjalan selama ini, dimana hanya di luasan LL yang mendapat dukungan sarana produksi lengkap selebihnya hanya mendapat bantuan benih dengan

memperhatikan aspek produktivitas serta Indeks Pertanaman (IP) yang memiliki potensi untuk ditingkatkan.

b) SL-PTT Spesifik Lokasi peningkatan produktivitas adalah seluruh areal SL-PTT mendapat dukungan sarana produksi lengkap pada areal yang produktivitasnya masih memiliki potensi untuk ditingkatkan.

c) SL-PTT Spesifik Lokasi peningkatan Indeks Pertanaman (IP) adalah seluruh areal SL-PTT mendapat dukungan sarana produksi lengkap pada areal yang indeks pertanamannya (IP) masih memiliki potensi untuk ditingkatkan.

Komponen teknologi unggulan PTT padi terdiri dari komponen teknologi dasar dan komponen teknologi pilihan. Untuk komponen teknologi dasar terdiri dari: (1) Varietas unggul baru, inbrida (non hibrida), atau hibrida, (2) benih bermutu dan berlabel, (3) pemberian bahan organik melalui pengembalian jerami ke sawah atau dalam bentuk kompos, (4) pengaturan populasi tanaman secara optimum, (5) pemupukan berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah, (6) Pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) dengan pendekatan PHT (pengendalian hama terpadu). Sedangkan, komponen teknologi pilihan, yaitu: (1) pengelolaan tanah sesuai musim dan pola tanam, (2) penggunaan bibit muda (< 21 hari), (3) tanam bibit 1-3 batang per rumpun, (4) pengairan secara efektif dan efisien, (5) penyiangan dengan landak atau gasrok, (6) panen tepat waktu dan gabah segera dirontok.

Menurut Departemen Pertanian (2012). Fokus utama peningkatan produktivitas padi melalui SL-PTT adalah upaya pencapaian sasaran produksi padi tahun 2012 yang difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas di kawasan areal tanam padi, yang terdiri dari: .SL-PTT padi sawah non hibrida dan hibrida.

a) SL-PTT padi sawah non hibrida Spesifikasi Lokasi Peningkatan IP seluas 14,75 ribu ha dengan melibatkan 590 kelompoktani/unit di 17 provinsi, 31 kabupaten/kota.

b) SL-PTT padi hibrida seluas 290.700 ha dengan melibatkan 29.000 kelompoktani/unit di 22 provinsi, 201 kabupaten/kota.

c) SL-PTT padi sawah hibrida Spesifikasi Lokasi Peningkatan Produktivitas seluas 9.300 ha dengan melibatkan 930 kelompoktani/unit di 13 provinsi, 148 kabupaten/kota.

d) SL-PTT padi lahan kering seluas 500.000 ha dengan melibatkan 20.000 kelompoktani/unit di 30 provinsi, 262 kabupaten/kota.

Penelitian ini dibatasi pada usahatani padi sawah dengan sistem yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Penentuan besarnya biaya usahatani padi sawah diperoleh dari intervensi pemerintah berupa kebijakan harga dan subsidi input. Setelah adanya usahatani padi sawah dan harga jual produk yang telah diatur berupa harga pembelian pemerintah maka akan diketahui apakah usahatani menguntungkan secara privat dan sosial serta dampak kebijakan yang akan diambil memperlihatkan bahwa usahatani padi sawah tersebut memilki daya saing atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut

maka digunakan alat analisis PAM, dimana alat analisis ini merupakan alat analisis untuk mengukur tingkat keunggulan kompetitif dan komparatif serta kebijakan pemerintah terhadap input dan output, disamping itu juga diperlukan analisis sensitivitas yang digunakan untuk mengukur elastisitas dari input dan output yang digunakan dalam usahatani tersebut.

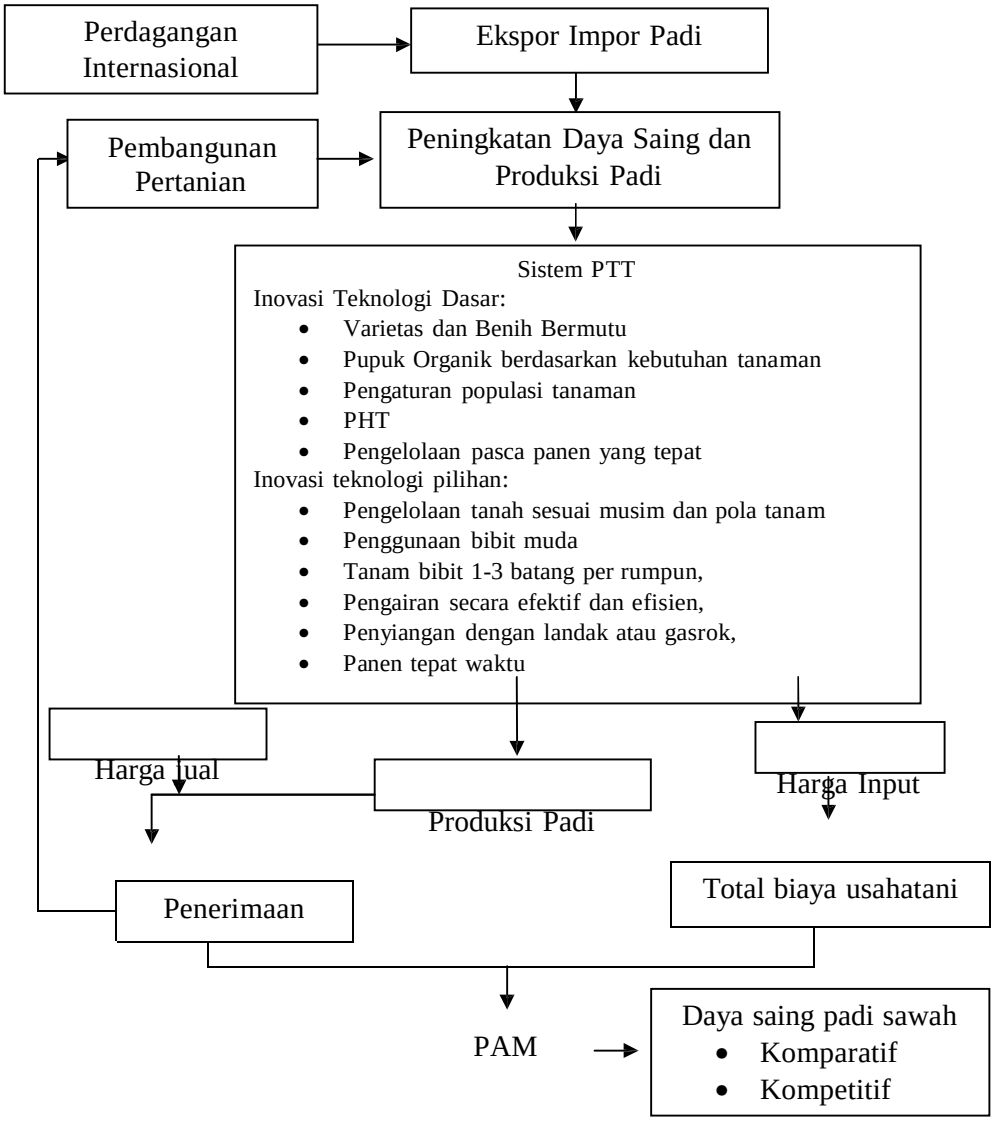

Gambar 1. Kerangka pemikiran daya saing padi sawah dengan sistem pengelolaan tanaman terpadu di Propinsi Lampung